

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

*Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori ini dibangun berdasarkan sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Teori *stewardship* mempunyai akar psikolog dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan *utilitas principals* dan manajemen.

Menurut teori *stewardship* kepentingan bersama adalah dasar seorang *stewards* melakukan tindakan. Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principals* dan *stewards*, maka *stewards* akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan *principals* dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap.

### 2.1.1 Akuntabilitas

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2005, Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Indra, 2010:385).

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Beberapa definisi akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 1. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
- b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan akurat
- f. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 2. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik sebagaimana dijelaskan Ellwood dalam Mardiasmo (2018) sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran yaitu terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan, sedangkan Akuntabilitas Hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas Proses terkait dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Serta adanya pelayanan publik yang cepat, reponsif dan pelayanan publik yang murah biaya.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program terkait dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas Program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Lembaga-lembaga publik hendaknya mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya dimasa depan.

3. Indikator Akuntabilitas

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya output dan outcome yang terukur.

Berdasarkan indikator akuntabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus melakukan seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap pelaksanaan kegiatan terdapat sanksi jika terjadi kesalahan. Sehingga pemerintah bertanggungjawab menghasilkan output dan outcome yang dapat diukur dalam setiap kegiatannya.

### **2.1.2 Transparansi**

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri dalam Ulya dan Astuti (2018), Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 disebutkan (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dancara sederhana, (4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatuan, dan kepentingan umum.

Menurut Mardiasmo (2018:18) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan adanya transparansi memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh atau dengan bebas memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yaitu informasi tentang proses pembuatan, kebijakan, dan pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai.

#### 1. Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) Indikator transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut:

##### a. Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

##### b. Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

##### c. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada, maupun prosedur pengaduan. Penerapan transparansi dikatakan baik ketika suatu organisasi memiliki komitmen yang tinggi, dimana komitmen yang tinggi dianggap sangat penting untuk mencapai tujuan, dan juga antara individu satu dengan individu lainnya mampu bekerja sama untuk memperkokoh organisasi tersebut.

### **2.1.3 Pengawasan**

Menurut (Benawan et al., 2018) Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya merupakan aktivitas membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Pengawasan (*controlling*) adalah proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju (Sukirno, 2005:99). Suatu pengawasan yang baik harus bersifat mendidik dalam arti mendidik kearah kerja yang baik dan menjauhkan kemungkinan-kemungkinan penyelewengan.

Beberapa definisi pengawasan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses sistematis untuk mengamati, memantau, dan mengevaluasi aktivitas, proses, atau perilaku dengan tujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, standar, peraturan, atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek dari suatu aktivitas atau proses dijalankan dengan benar, efisien, dan efektif.

#### 1. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut (Revrisond Baswir, 2000:121), jenis – jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan obyek, sifat, ruang lingkup, dan berdasarkan metode pengawasan, yaitu:

##### a. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan berdasarkan objek dapat dikelompokkan menjadi pengawasan terhadap penerimaan-penerimaan negara dan pengawasan terhadap pengeluaran-pengeluaran negara.

##### b. Pengawasan menurut sifatnya

Pengawasan menurut sifatnya dikelompokkan menjadi pengawasan preventif (sebelum dilaksanakannya kegiatan) dan pengawasan detektif (meneliti dokumen-dokumen dari laporan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang sudah dilakukan).

##### c. Pengawasan menurut ruang lingkup

Pengawasan menurut ruang lingkungannya dapat dibedakan menjadi pengawasan internal (dilakukan oleh pengawas dari dalam organisasi) dan



pengawasan eksternal (dilakukan oleh pengawas dari luar lingkungan organisasi).

d. Pengawasan menurut metode pengawasan

Pengawasan menurut metode pengawasannya dapat dibedakan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai atau belum dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun berasal dari lingkungan eksternal pemerintah.

2. Indikator Pengawasan

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) terdiri dari empat indikator yaitu:

- a. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi.
- b. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.

- c. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
- d. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

#### **2.1.4 Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, menyatakan bahwa “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang dimiliki.

Kinerja merupakan suatu hasil atau kondisi yang perlu diketahui dan dilaporkan kepada pihak tertentu guna mengetahui melihat pencapaian hasil dari suatu instansi dengan tujuan yang diemban oleh suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan operasional tersebut (Ambarwati, 2021).

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan ataupun sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku atau standar proses yang ditetapkan.

#### 1. Konsep *Value For Money*

Konsep *value for money* adalah sebuah konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat hanya dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas : ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.

- 1) Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- 2) Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan output/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

- 3) Efektivitas adalah tingkat pencapaian atau hasil program dengan target yang ditentukan sebelumnya. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

## 2. Indikator Kinerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi BPKP NTT adalah dengan indikator *Value for Money* yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2018). Keseluruhan indikator yang digunakan tersaji dalam kuisisioner yang diadopsi dari Setiyanningrum (2017). Indikator yang digunakan yaitu:

- 1) Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) Ekonomi berarti pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik. Sedangkan efisiensi artinya output dapat dicapai dengan biaya yang rendah.
- 2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi mencapai target atau tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

## 2.2 Kajian Empirik

Dalam rangka menunjang keberhasilan penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi (Studi pada BPKAD Padang). Ambarwati (2021)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah .</li> <li>2) Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.</li> <li>3) Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.</li> </ol>
2	Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Bambang Jatmiko (2020)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.</li> <li>2) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.</li> <li>3) Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.</li> <li>4) Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.</li> </ol>
3	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Kota Makassar. Firmansyah, Muhtar Sapiri, dan Lukman Setiawan	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money.</li> <li>2) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money.</li> </ol>

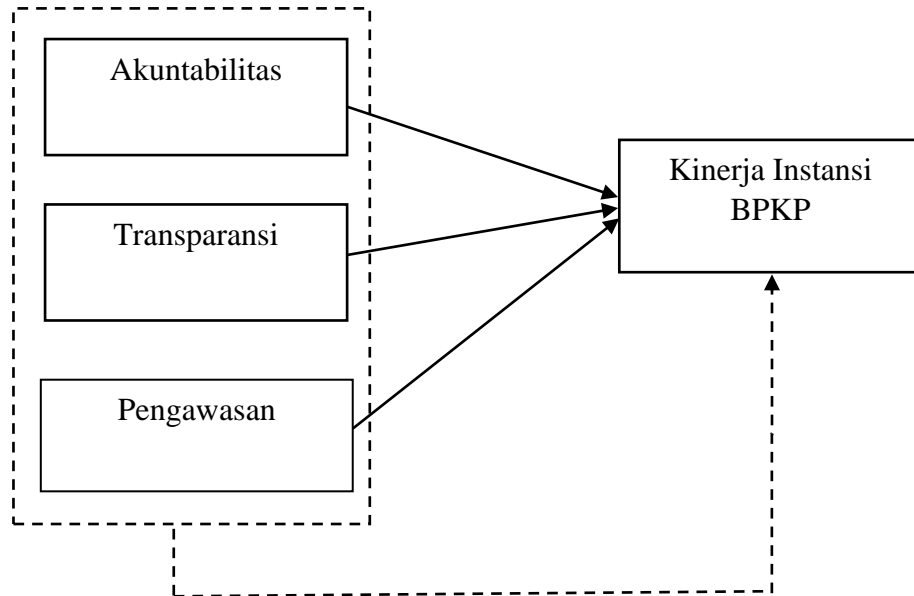
	(2018)		3) Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money.
4	Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). Erick Try Putra Benawan, David P. E. Saerang, dan Winston Pontoh (2018)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.</li> <li>2) Akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.</li> <li>3) Transparansi Keuangan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.</li> <li>4) Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.</li> </ol>
5	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah. Eka Ratna Aprianti dan Ikhsan Budi Raharjo (2017)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.</li> <li>2) Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.</li> <li>3) Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.</li> </ol>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ditunjukkan dengan menggunakan variabel independen berupa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dengan variabel dependennya yaitu kinerja instansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni objek penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, akuntabilitas dan transparansi memiliki peran penting untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dan kepercayaan kepada publik. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Instansi Pemerintah.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Keterangan:

- > : Secara Simultan
- > : Secara Parsial

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Teori *stewardship* berkaitan dengan akuntabilitas yakni teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991; Nasution, 2022). Dalam hal ini, BPKP memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa sumber daya keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh lembaga pemerintah dikelola dengan efektif dan efisien. Teori tersebut



mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Hal ini mengarah pada peningkatan kinerja pemerintah karena mereka harus menjelaskan dan membuktikan bahwa tindakan dan keputusan mereka didasarkan pada pertimbangan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian dari Damayanti (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemerintah. Semakin baik bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H<sub>1</sub> : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

#### **2.4.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Dalam teori *stewardship*, transparansi kinerja pemerintah menjadi penting karena melibatkan hak publik untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola dan bagaimana kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Transparansi kinerja BPKP melibatkan upaya untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan pemerintah. Dalam konteks teori *Stewardship*, ini mencerminkan upaya BPKP untuk bertindak sebagai pengelola sumber daya publik yang berorientasi pada tujuan dan keterbukaan, sehingga publik dapat memahami bagaimana sumber daya tersebut dikelola.

Penelitian dari Damayanti (2018) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemerintah. Transparansi kinerja pemerintah menjadi penting karena melibatkan hak publik untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola dan bagaimana kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H<sub>2</sub>: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

#### **2.4.3 Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Teori *stewardship* dan pengawasan saling terkait dalam konteks pengelolaan sumber daya publik dan pemerintahan yang baik. Teori *stewardship* menekankan tanggung jawab para pejabat pemerintah untuk mengelola dengan baik sumber daya publik, sementara pengawasan merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa tanggung jawab ini dijalankan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. BPKP harus bertanggung jawab atas hasil pengawasannya dan harus dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah dalam pengelolaan dana publik. Ini penting dalam upaya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penyalahgunaan sumber daya publik, serta untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Penelitian dari Ambarwati (2021) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Pengawasan membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dengan menemukan masalah ini secara dini, instansi

dapat mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan instansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H<sub>3</sub> : Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

#### **2.4.4 Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Teori *stewardship* pada dasarnya mendorong pemerintah untuk bertindak sebagai pengelola yang baik atas sumber daya publik, dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sebagai elemen-elemen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini pentingnya akuntabilitas, transparansi dan pengawasan kinerja dalam tugas BPKP sebagai pengawas keuangan dan pembangunan. BPKP dapat memastikan bahwa mereka bertindak sebagai pengelola sumber daya publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada itikad baik untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian dari Novatianti (2019) menunjukkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Valerianus (2021) menunjukkan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H<sub>4</sub> : Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah.